



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DAN**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018**

**Disampaikan :
PADA RAPAT PARIPURNA
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Samarinda, 11 Juni 2019

*Bismillahirrahmannirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

**Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota DPRD
Provinsi Kalimantan Timur,**

**Yth. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur,**

**Yth. Kepala Dinas/Badan/Lembaga dan Instansi Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur,**

**Yth. Para Pimpinan Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat
dan Tokoh Pemuda Provinsi Kalimantan Timur serta
rekan-rekan Pers dan hadirin yang saya hormati.**

Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua,

sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018.

Sidang Dewan Yang terhormat,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan tahun 2018, ***merupakan kewajiban konstitusional dan laporan perkembangan tahunan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kami selaku Kepala Daerah Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018*** yang harus disampaikan kepada anggota DPRD yang terhormat.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban menyampaikan gambaran objektif, langkah-langkah yang telah ditempuh, pencapaian sasaran pembangunan dan kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Sebelumnya dapat kami sampaikan bahwa telah terjadi transisi kepemimpinan Kepala Daerah yang terjadi pada Bulan Oktober tahun 2018 dari Gubernur Kaltim 2013-2018 kepada Gubernur terpilih 2018-2023 yang dilantik Oleh Bapak Presiden pada tanggal 1 Oktober 2018 dan secara pelaksanaan anggaran Gubernur Kaltim 2013-2018 masih menyisakan tiga bulan akhir pelaksanaan anggaran tahun 2018 karena berakhir di bulan desember, sehingga sisa pelaksanaan tersebut dilanjutkan oleh Gubernur terpilih 2018-2023.

Tahun 2018 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018

dalam masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode Tahun 2013-2018, dan bersamaan dengan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Visi Kaltim Maju 2018 “**Mewujudkan Kalimantan Timur Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan**” merupakan semangat untuk membangun masa depan ekonomi daerah Kalimantan Timur yang berbasis sumberdaya alam terbarukan, tidak tergantung atas migas dan batubara yang di awal RPJMD 2013-2018 mendominasi hingga 55,15% dari total PDRB.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur berkomitmen pada lima Misi yang sekaligus menjadi agenda utama pembangunan, yaitu;

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan;
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik;
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.

Pemerintah Daerah secara konsisten terus melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan melalui program dan kegiatan pada Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang telah sejalan dengan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan visi misi dan agenda Nawacita Presiden Republik Indonesia **H. Joko Widodo** dan Wakil Presiden Republik Indonesia

H.M. Jusuf Kalla. Sejalan dengan agenda Nawacita, Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 12 Prioritas Pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
3. Percepatan pengentasan kemiskinan.
4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja.
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan.
6. Percepatan transformasi ekonomi.
7. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan.
8. Pengembangan agribisnis.
9. Peningkatan produksi pangan/penguatan cadangan pangan.
10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar.
11. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia,

Sebelum saya menyampaikan materi pokok ***Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Timur dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018***, terlebih dahulu pada ***BAGIAN PERTAMA*** saya akan menyampaikan secara ringkas kondisi makro perkembangan sosial ekonomi Kalimantan Timur.

Perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2018 pertumbuhannya mencapai 3,13%. Capaian laju pertumbuhan ini telah memenuhi target yang ditetapkan pada dokumen Perubahan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Dimana target pemerintah provinsi untuk capaian laju pertumbuhan ekonomi berkisar antara 0,5±1 persen. Hal ini terutama di dorong oleh masih

terjaganya stabilitas harga minerba yang menjadi komoditas utama ekspor (perdagangan luar negeri) Kalimantan Timur.

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor-sektor potensial seperti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi terhadap PDRB 6,27%, sektor Pegadaan Listrik, Gas berkontribusi 9,76%, sektor Konstruksi 7,37%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,44%, sektor Transportasi dan Pergudangan 6,34%, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,14%, sektor Jasa Pendidikan 7,47%, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,05%, sektor Jasa lainnya 9,02%. Sedangkan sampai dengan Tahun 2018 PDRB Prov Kaltim atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 638,116 Triliun.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 mencapai 6,03% lebih baik dibandingkan dengan capaian Nasional sebesar 9,82%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 mencapai 6,90% lebih baik dibanding tahun 2017 sebesar 6,19%.

Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali. Laju inflasi Kalimantan Timur sebesar 3,15% pada tahun 2017 menjadi sebesar 3,24% pada tahun 2018. Dengan demikian, inflasi Kalimantan Timur tahun 2018 telah mencapai target inflasi nasional sebesar $4 \pm 1\%$.

Sidang Dewan Yang terhormat,

Pada BAGIAN KEDUA ini perkenankan saya menyampaikan substansi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD tahun 2018, ***dengan urutan sebagai berikut :***

1. Pendapatan

Pada tahun 2018 pendapatan daerah ditetapkan dengan target mencapai Rp.9,591 Triliun, sampai dengan 31 Desember 2018 pendapatan daerah mencapai Rp.10,669 Triliun atau mencapai 111,24% dari target yang ditetapkan tersebut. Realisasi pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.5,8 Triliun dan Pendapatan dari Dana Perimbangan Rp.4,829 Triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi sebesar Rp.15,510 Miliar. Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 54,49% lebih besar dari Dana Perimbangan sebesar 45,37%, hal ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur telah menuju kepada kemandirian fiskal. Pemerintah Provinsi terus berupaya membangun kemandirian fiskal melalui terobosan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Belanja Daerah

Pada Tahun 2018 realisasi Belanja Daerah mencapai Rp.9,345 Triliun atau mencapai 92,26% terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp.1,626 Triliun dan Belanja Modal Rp.1,829 Triliun, belanja Pegawai sebesar Rp.1,756 Triliun, serta belanja lainnya yang mencapai Rp.4,316 Triliun.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia,

BAGIAN KETIGA, selanjutnya saya sampaikan ***pencapaian sasaran pembangunan dan kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur*** dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan ***Lima Misi Pembangunan*** meliputi ***Urusan Wajib*** dan ***Urusan Pilihan*** yaitu :

MISI PERTAMA,

Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi

Dalam misi pertama ini pembangunan dilaksanakan untuk mencapai satu tujuan yaitu “Meningkatkan kualitas SDM Kaltim” dengan lima sasaran yaitu (1) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (2) Meningkatkan Angka Melek Huruf; (3) Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah; (4) Meningkatnya Angka Harapan Hidup; dan (5) Meningkatnya Pendapatan Perkapita. Kemudian capaian pembangunan sumber daya manusia ditandai dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu 75,83 pada tahun 2018.

Pencapaian target Misi Pertama ini dilakukan melalui upaya pencapaian *Prioritas pembangunan 1: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan; Prioritas pembangunan 2: Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; dan Prioritas pembangunan 5: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.*

Pelaksanaan ***Prioritas Pembangunan 1 "Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan"*** menunjukkan hasil yang cukup baik dilihat dari angka melek huruf yang mencapai 98,96% dari target sebesar 99,50%, dan Rata-rata Lama Sekolah mencapai 9,62 tahun mendekati target 12,00 tahun pada tahun 2018.

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian ***Prioritas Pembangunan 1; Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan,*** antara lain :

1. Peningkatan pendidikan dan pengembangan SDM berupa pemberian beasiswa kepada 1671 siswa.
2. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi kepada 200 guru.
3. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan serta pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan kepada 200 guru.

4. Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan kepada 200 guru.
5. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi kepada 200 guru.

Capaian pembangunan sumber daya manusia selanjutnya untuk bidang kesehatan juga sangat baik ditunjukkan dengan angka harapan hidup yang telah mencapai 73,70 tahun dari target 74,00 tahun. Pencapaian angka harapan hidup di Kalimantan Timur tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai kegiatan dalam upaya pencapaian **Prioritas Pembangunan 2; Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan**, antara lain :

1. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan kegiatan Gerakan masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan melibatkan 400 orang dalam upaya mensosialisasikan GERMAS sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Kabupaten/Kota dan Provinsi termasuk didalamnya pembangunan gedung laboratorium fertilitas, pembangunan gedung farmasi dan CPOB.
3. Peningkatan kualitas layanan dengan penyediaan alat kesehatan di Rumah Sakit Kabupaten/Kota dan Provinsi sebanyak 22 unit termasuk didalamnya penyediaan unit MRI dan USQ.
4. Penyediaan kendaraan 2 unit ambulance emergency.
5. Inovasi dalam peningkatan pelayanan kesehatan dasar berupa pelayanan kesehatan bergerak di Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Pelayanan kesehatan rujukan dengan kegiatan pengawasan untuk 50 Rumah Sakit di Kalimantan Timur.

Sidang Dewan Yang terhormat,

Pencapaian pada MISI KEDUA yaitu “*Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan*”

Misi kedua ini menekankan pada 2 (dua) tujuan yaitu :

- Tujuan 1, “*Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat*” dengan sasaran menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya indeks gini, menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya daya beli masyarakat;
- Tujuan 2, “*Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau*” dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas, tercapainya swasembada pangan, dan meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan.

Pencapaian ***Tujuan 1 Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat*** dilaksanakan melalui Upaya pelaksanaan *Prioritas Pembangunan 3; Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Prioritas Pembangunan 4; Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dan Prioritas pembangunan 5; Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.*

Capaian indikator pembangunan dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan yang ditargetkan 6,00% dalam realisasinya mencapai 6,03%. Belum tercapainya target tersebut disebabkan oleh migrasi penduduk dari luar daerah yang tidak memiliki keterampilan kerja.

Berbagai upaya telah dilakukan melalui ***Prioritas Pembangunan 3; Percepatan Pengentasan Kemiskinan,*** antara lain :

1. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, sejumlah 35 unit rumah dan 4 rumah tapak.

2. Pembangunan prasarana dan sarana rumah sederhana sehat di Kota Samarinda dan Balikpapan.
3. Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana, melalui kegiatan Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Desa Tangguh Bencana (Destana) Kalimantan Timur sebanyak 11 lokasi destana dan rekrutan Relawan Penanggulangan Bencana sebanyak 90 orang.

Kemudian terkait dengan Indeks Gini atau ketimpangan pendapatan penduduk Kalimantan Timur, capaian pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,34 dari target 0,32. Jika dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional sebesar 0,39, capaian ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan distribusi pendapatan Kaltim tahun 2018 lebih baik dari rata-rata nasional.

Selanjutnya, terkait dengan upaya penurunan pengangguran menunjukkan hasil yang lebih baik, hal ini terlihat dari penurunan angka pengangguran dari 6,91% pada tahun 2017 menjadi 6,60% pada tahun 2018, dan melampaui target 7,00%.

Berbagai upaya juga telah dilakukan melalui **Prioritas Pembangunan 4; Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja**, antara lain :

1. Pelatihan kewirausahaan dengan jumlah tenaga pendamping pengembangan kewirausahaan sebanyak 4 orang.
2. Pengembangan produksi dan akses Usaha Kecil Menengah dengan capaian persentase PDRB sektor Koperasi dan UKM sebesar 12,83 %.
3. Pengembangan kewirausahaan kompetitif melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dengan capaian jumlah pencari kerja yang memiliki ketrampilan berwirausaha sebanyak 20 orang.

Kemudian berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui **Prioritas Pembangunan 5; Pengembangan Ekonomi Kerakyatan**, antara lain :

1. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk melalui acara bazar/pasar murah yang dilaksanakan sebanyak 5 kali.
2. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan berupa laporan informasi harga harian komoditi pokok dan barang strategis yang ditindak lanjuti serta jumlah informasi penerbitan SIUP dan TDP yang dimonitor sebanyak 64 jenis komoditi.

Pencapaian **Tujuan 2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau** dilaksanakan melalui : *Prioritas pembangunan 6; Transformasi Ekonomi, Prioritas pembangunan 7; Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan; Prioritas pembangunan 8; Pengembangan Agribisnis, dan Prioritas Pembangunan 9; Penguatan Cadangan Pangan.*

Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 cukup menggembirakan yaitu ditunjukkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi dengan migas sebesar 2,67% yang telah melampaui target $0,5\pm 1$; pertumbuhan ekonomi dengan non migas 4,22% telah melampaui target 1 ± 1 ; dan pertumbuhan ekonomi dengan non migas dan non batubara sebesar 6% yang telah melampaui target 4 ± 1 .

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pelaksanaan **Prioritas Pembangunan 6; Percepatan Transformasi Ekonomi** melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor primer dengan jumlah izin investasi sektor primer yang diterbitkan sebanyak 623 izin/non izin.
2. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor sekunder dan tersier dengan jumlah izin investasi sekunder dan tersier yang diterbitkan sebanyak 830 izin/non izin.
3. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dengan jumlah izin penanaman modal yang diterbitkan sebanyak 48 izin/non izin.
4. Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal dengan capaian jumlah perusahaan yang dibina sebanyak 59 perusahaan.
5. Pemantauan dan evaluasi Penanaman Modal dengan capaian jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM sebanyak 46 perusahaan.
6. Peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP. Melalui Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru (MYC) dan Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Kutai Timur yang terdiri pembangunan Causeway dan pembangunan trestle.

Selanjutnya, upaya pemerintah untuk meningkatkan sektor pertanian dalam arti luas telah sejalan dengan arah transformasi ekonomi. Peran sektor pertanian dalam struktur perekonomian daerah mencapai 6,27% di tahun 2018. Hal ini berarti proses transformasi struktur ekonomi ke arah sumberdaya alam yang terbarukan telah berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan pada visi Kalimantan Timur. Walaupun disadari masih terkendala

pada keterbatasan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung proses hilirisasi produk-produk unggulan non migas, seperti CPO, Karet dan produk pertanian tanaman pangan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pelaksanaan **Prioritas Pembangunan 7; Pengembangan Agribisnis** melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit, melalui kegiatan Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan berupa bibit lada 40.000 batang, pupuk organik 80.000 kg, herbisida 25 liter untuk perluasan areal komoditas lada seluas 25 Hektar.
2. Peningkatan Produktivitas Perkebunan melalui kegiatan Intensifikasi komoditi berupa Pupuk Organik 30.000 Kg dan Pestisida 75 liter untuk kebun lada seluas 75 Hektar.
3. Pengembangan usaha perikanan dan kelautan dengan capaian Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan (SIUP) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup (SIKPI) sebanyak 70 perizinan.
4. peningkatan dan pengembangan pengelolaan produksi perikanan dengan capaian Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan dan Sertifikasi sebanyak 30 UKM.
5. Pengembangan kawasan dan peningkatan produksi pakan ternak dengan capaian luas padang penggembalaan seluas 475 ha, luas Kebun HMT seluas 1.213 ha dan kawasan peternakan di 5 Kecamatan.
6. Pengembangan Agribisnis Peternakan dengan kegiatan mitra perunggasan sebanyak 30 orang; peternak yang mengikuti Kredit Ternak Sejahtera (KTS) sebanyak 26 orang; kelompok peserta sosialisasi asuransi ternak sebanyak 7 orang.

Terkait dengan upaya swasembada beras, capaian sasaran Penguatan Cadangan Pangan ditunjukkan oleh Rasio pemenuhan beras mencapai 75,53%, dengan produksi beras sebesar 240.894 ton. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan beras di Kalimantan Timur adalah rendahnya produktivitas padi, alih fungsi lahan dan berkurangnya jumlah petani sawah serta tenaga penyuluh. Adapun produktivitas padi sawah Kalimantan Timur hanya mencapai 41,76 kw/ha.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam arti luas dalam pembentukan PDRB, telah dilakukan melalui **Prioritas Pembangunan 8; Peningkatan Produksi Pangan**, antara lain :

1. Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan dengan capaian Luas Pengembangan Produksi Padi Lahan Kering seluas 1.000 hektar.
2. Pengembangan Perbibitan dan Inseminasi Buatan dengan capaian ternak sapi bibit yang memiliki SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit) sebanyak 50 ekor, akseptor IB sebanyak 3.500 ekor dan peternak pembibit sebanyak 30 KK.
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peternak dengan hasil berupa profil kelompok ternak sebanyak 5 kelompok.
4. Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan dengan capaian peserta pelatihan pengolahan hasil peternakan sebanyak 20 orang.
5. Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal dengan hasil 10 sertivikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang diterbitkan;
6. Pengelolaan kenelayanan dengan capaian Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap yang Dibina sebanyak 50 KUB.
7. Pengendalian Penangkapan Ikan dengan capaian Perizinan Kapal Ikan sebanyak 235 izin.

8. Pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fungsional pelabuhan perikanan (DAK) Turap untuk Bangunan TPI Ikan Air Tawar.
9. Pembangunan dan Perbaikan Balai Diklat Pertanian sebanyak 7 unit.

Terkait dengan capaian **Prioritas Pembangunan 9; Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan** dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi hijau, ditunjukkan oleh persentase bauran energi baru terbarukan di tahun 2018 yang mencapai sebesar 4,92%. Tingkat pemenuhan kebutuhan listrik cukup menggembirakan, hal ini ditunjukkan oleh Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Timur telah mencapai 84,21% dan dengan desa berlistrik 98,07%. Kebijakan pemenuhan listrik di kawasan pedesaan, perbatasan dan daerah terpencil ditempuh dengan pengembangan energi baru terbarukan berbasiskan potensi masing-masing daerah serta pemenuhan jaringan listriknya.

Berbagai upaya meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan telah dilakukan melalui **Prioritas Pembangunan 9; Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan**, antara lain :

1. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan dengan capaian Desa yang memiliki potensi EBT sebanyak 5 desa, serta pengawasan PLTS terpusat di 5 lokasi.
2. Energi Skala Kecil (DAK) dengan capaian PLTS yang terpasang sebanyak 3 unit, serta Bidigester sebanyak 31 unit.
3. Perencanaan Pengembangan ketenagalistrikan daerah dengan kegiatan berupa Evaluasi RUPTL sebanyak 5 lokasi.

***Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,
serta hadirin yang berbahagia,***

Misi ketiga Kaltim Maju 2018 adalah Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata, dengan tujuan Menyediakan Infrastruktur dasar yang berkualitas serta sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar. Kepuasan masyarakat tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), dimana pada tahun 2018 telah mencapai target yakni 7 atau masuk dalam kategori cukup.

Pemerintah Provinsi terus berupaya dalam pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas, agar dapat meningkatkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kelancaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara merata, sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah.

Upaya pencapaian target Misi Ketiga ini diwujudkan melalui pencapaian ***Prioritas Pembangunan Kesepuluh; Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar***, antara lain :

1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan dan penanganan titik longsor.
2. pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 973 meter, pemeliharaan jembatan sepanjang 2.885 m dan penanganan longsor sepanjang 33 meter.
3. Pembangunan Jalan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari dengan capaian 12 Km.
4. Pembangunan Jembatan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari dengan pembangunan jembatan Baeley 2 unit.
5. Pembangunan reservoir dengan capaian Pemasangan Rip - Rap seluas 2.883,19 m².

6. Pembangunan reservoir pengendali banjir dengan capaian Bangunan Pengendalian Banjir Sistem Karang Asam Kecil sepanjang 154 meter.
7. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai dengan capaian Bangunan Pengendali Banjir Loa Janan dan Rapak Dalam sepanjang 130 meter.
8. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali dengan capaian Normalisasi sungai Loa Bakung sepanjang 1.050 meter.
9. Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir dengan capaian Bangunan Pengendali Banjir Sistem Karangamumus sepanjang 154 meter.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia,

Misi keempat Kalimantan Timur Maju 2018 adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan 3 (tiga) sasaran; 1) *Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN*; 2) *Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*; 3) *Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja*.

Capaian sasaran pertama, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada tahun 2018 indikator Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai 5,56 dari target 5,80. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah tahun 2018.

Capaian sasaran kedua, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2018 dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 80,56 dari target 83,00 (kategori Baik).

Capaian sasaran ketiga, berdasarkan evaluasi Kementerian PAN dan RB RI pada tahun 2018 terhadap kapasitas dan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencapai nilai BB (sangat baik). Pemerintah Provinsi bertekad akan terus meningkatkan kinerja melalui program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja.

Pelaksanaan Demokrasi Kalimantan Timur juga berjalan baik, ditunjukkan oleh angka partisipasi Pilgub tahun 2018 sebesar 58,2%

Upaya pencapaian target Misi Keempat ini melalui pencapaian ***Prioritas Pembangunan 11; Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan***, antara lain :

1. Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik dengan hasil Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) sebanyak 54 IGT.
2. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS dengan hasil pegawai yang naik pangkat tepat waktu sebanyak 1.543 SK.
3. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah dengan hasil aplikasi kepegawaian yang dikembangkan sebanyak 3 aplikasi; data PNS yang terupdate dalam sistem SIMPEG dan SAPK sebanyak 1.017 data.
4. Penilaian Prestasi Kerja PNS dengan capaian PNS yang memiliki nilai diatas cukup dengan predikat BAIK dan BAIK SEKALI dengan persentase 94%.
5. Penerapan zona integritas pada SKPD dengan capaian OPD yang ditetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK/WBBM sebanyak 2 OPD.
6. Pemantauan perkembangan politik di daerah dengan capaian Partisipasi Pemilih pada Pilgub 2018 sebesar 58,16%.

***Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,
serta hadirin yang berbahagia,***

Misi kelima Kalimantan Timur Maju 2018 adalah Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Baik dan Sehat Serta Berperspektif Perubahan Iklim, dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan dengan sasaran (1) Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan, (2) Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai sasaran meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang pada tahun 2018 mencapai angka sebesar 82,64 dengan kategori sangat baik. Permasalahan utama adalah rendahnya tutupan lahan akibat pembukaan lahan untuk pertambangan dan perkebunan.

Saat ini intensitas emisi Kalimantan Timur mencapai 1.515 ton CO₂equivalen/Juta USD PDRB dan telah mencapai target penurunan intensitas emisi 1.800 Ton CO₂equivalen/Juta USD PDRB yang ditetapkan pada tahun 2018.

Untuk mewujudkan pencapaian target Misi Kelima, Prioritas Pembangunan yang ditetapkan adalah ***Prioritas Pembangunan 12*** yaitu ***Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup***. Adapun program kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan ***Prioritas Pembangunan 12, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup*** antara lain :

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan capaian Luas penanaman dan pemeliharaan seluas 18.136,77 Hektar.
2. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir dengan target luasan rehabilitasi mangrove dan pesisir seluas 725 Hektar dalam proses pelaksanaan kegiatan sampai akhir tahun 2018.
3. RHL Vegetatif untuk Pengelolaan Kawasan Hutan (DAK) dengan target Luas penanaman dan pemeliharaan seluas 200 Hektar dalam proses pelaksanaan kegiatan sampai akhir tahun 2018.

4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping DBH SDA DR) dengan target Luas penanaman dan pemeliharaan seluas 8.750 Hektar dalam proses pelaksanaan kegiatan sampai akhir tahun 2018.
5. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir (Dana Pendamping DBH SDA DR) dengan capaian Jumlah luasan rehabilitasi mangrove dan pesisir seluas 900 Hektar dalam proses pelaksanaan kegiatan sampai akhir tahun 2018.
6. Perlindungan sumber air di areal perkebunan dengan capaian Jumlah embung yang dilindungi sebanyak 10 unit.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia,

Demikian penjelasan terhadap upaya pencapaian sasaran lima misi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka menuntaskan target sasaran sampai dengan akhir tahun 2018, antara lain :

- ketidakpastian kebijakan transfer dana pusat ke daerah mempengaruhi pembiayaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan;
- Seringnya terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada daerah;
- Kewenangan Pemerintah Pusat yang masih dominan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur;
- Kurangnya peran aktif Kabupaten/Kota dan Masyarakat dalam pembebasan lahan untuk pembangunan;
- Belum optimalnya sinergitas program dan kegiatan, baik antar sektor maupun antar pelaku pembangunan.

Sidang Dewan Yang terhormat,

Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan **BAGIAN KEEMPAT**, terkait dengan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan Tugas Umum Pemerintahan.

Pada tahun 2018 alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Dekonsentrasi yang bersumber dari APBN sebesar Rp.129,764 Miliar, dalam rangka mendukung pencapaian target prioritas nasional dan Provinsi Kaltim.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi di tahun 2018 mencapai realisasi sebesar Rp.118,610 Miliar atau 91,42%, yang bersumber dari 19 Kementerian/Lembaga, dan dilaksanakan oleh 19 Perangkat Daerah di tingkat Provinsi sebanyak 48 program dan 129 kegiatan. Selanjutnya untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan ditingkat Provinsi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBN tahun 2018 sebesar Rp.201,851 Miliar.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mencapai realisasi sebesar Rp.196,067 Miliar atau 97,13%, yang bersumber dari 7 Kementerian/Lembaga. Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan di tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 meliputi 6 Perangkat Daerah dan pelaksana Tugas Pembantuan di tingkat Kabupaten/Kota meliputi 7 Perangkat Daerah.

Realisasi pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan belum berjalan optimal karena masih menghadapi berbagai persoalan antara lain :

1. Penyusunan program/kegiatan dan anggaran yang belum melibatkan Pemerintah Daerah.
2. Keterlambatan dalam penyampaian/penerbitan DIPA, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).

3. Ketidakselarasan kelembagaan (Dinas/Instansi/Satker) yang terdapat di Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Pusat yang menjadi penanggungjawab dan pelaksana di daerah.
4. Ketidaksesuaian antara alokasi dana dalam DIPA dengan usulan alokasi dana kegiatan yang telah diusulkan oleh daerah sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat berjalan optimal.

Selanjutnya kami sampaikan pula Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan meliputi; 1) Kerjasama antar daerah; 2) Kerjasama daerah dengan pihak ketiga; 3) Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; 4) Pembinaan batas wilayah; 5) Pencegahan dan penanggulangan bencana; 6) Pengelolaan kawasan; dan 7) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, antara lain :

1. Kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam bidang sosial budaya, pariwisata, pendidikan, kesehatan, kelautan, pertanian, perkebunan, lingkungan, industri, kependudukan, tata ruang, sarana prasarana dan infrastruktur, serta inovasi dan teknologi;
2. Kerjasama dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyangkut kerjasama pembangunan daerah; dan dengan Provinsi Kalimantan Barat menyangkut kerjasama perdagangan komoditi mineral dan batubara.
3. Kerjasama dengan instansi vertikal yaitu dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Komando Daerah Militer VI/Mulawarman, Polda Kaltim, Kejaksaan Tinggi, dan Institut Teknologi Kalimantan.

4. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pedoman operasional perhutanan sosial, perdagangan komoditas unggulan antar daerah, pengoperasian gedung VIP Bandar Udara Internasional Sultan Aji Balikpapan dan pengelolaan Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, perlindungan orang utan dan habitatnya.
5. Kerjasama dengan luar negeri yaitu kerjasama dengan Pemerintah Negara Seychelles menyangkut pengembangan kawasan industri pariwisata maratua.

Dalam rangka pembinaan batas Administrasi Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur meliputi 10 Kabupaten/Kota, 103 Kecamatan, 197 Kelurahan dan 841 Desa sampai dengan tahun 2018 telah dicapai kesepakatan antara lain :

1. Batas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur sepanjang \pm 1.325,69 Km;
2. Batas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi lain sepanjang \pm 1.216,76 Km;
3. Batas antar Kabupaten/Kota dan batas Provinsi Kalimantan Timur sepanjang \pm 2.542,45 Km;
4. Pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) sebanyak 138 PBU dari total 834 PBU yang harus dipasang;
5. Pembakuan Nama Rupabumi terhadap nama rupabumi unsur buatan Provinsi Kalimantan Timur tercapai sejumlah 20.238 unsur buatan sejak tahun 2015 sampai dengan 2017.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan Pengembangan sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana; Pengembangan SDM penanggulangan bencana; Penyebarluasan informasi

penanggulangan bencana; Pemantauan daerah rawan bencana; Pemantauan alat deteksi dini banjir dan longsor; serta Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana (DESTANA) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Barat, Berau dan Kota Bontang.

Selanjutnya terkait dengan pengelolaan kawasan, terdapat satu kawasan khusus di Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2014, yakni Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK). Untuk mendukung perencanaan KEK MBTK tersebut, Pemerintah Provinsi telah melakukan Penyusunan Ranperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Industri Oleochemical (KIO) Maloy. Pada tahun 2018 telah sampai pada tahap telah didapatkan persetujuan peta dasar KSP KIO Maloy oleh Badan Informasi Geospasial pada tahun 2018, telah dilaksanakan konsultasi ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam rangka validasi KLHS RTR KIO Maloy pada tahun 2018, dan telah dilaksanakan Konsultasi Publik KSP KIO Maloy tersebut.

Saat ini, telah terbangun jalan akses sepanjang 17,4 Km, jalan dalam kawasan 11,44 Km dengan perkerasan tanah serta rigid. Terkait penyediaan air baku, telah tersedia intake di Sekerat dan saat ini sedang dilakukan pembangunan jaringan pipa transmisi sepanjang 24,2 Km dengan kapasitas 500 liter/detik. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) akan tuntas tahun 2018 dengan kapasitas 200 liter/detik.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sepanjang tahun 2018, antara lain :

1. Penanganan Protokoler dan objek Vital.
2. Pengamanan aset pemda .
3. Pengamanan unjuk rasa.
4. Jumlah pengamanan dan penertiban non yustisi.

5. Jumlah operasional Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patrol).
6. pengamanan di Kantor dan Rumah Jabatan berbentuk pengamanan kantor Gubernur, Rumah jabatan Gubernur, Rumah jabatan Wakil Gubernur, dan Rumah jabatan Sekda Prov. Kaltim serta pengamanan.

Sidang Dewan Yang terhormat,

Demikian Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan, kemudian sepenuhnya saya serahkan kepada Dewan yang terhormat untuk memberikan tanggapan dalam upaya perbaikan kinerja pemerintah.

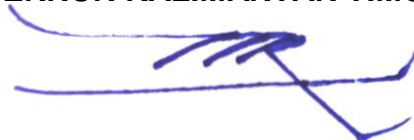
Mengakhiri penjelasan ini, ijin saya menyampaikan terima kasih kepada Saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat serta para hadirin semua, atas segala perhatian dan kesabarannya dalam mengikuti penyampaian ***Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018.***

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah Nya bagi kita sekalian, terutama untuk kemuliaan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

***Wabillahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamualaikum wr. wb.***

Samarinda, 11 Juni 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si